

KORAN DIGITAL

radar.  
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI KAMIS  
14 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



# APBD-P 2023, DPRD KALTIM SAMPAIKAN EMPAT CATATAN KEPADA PEMPROV KALTIM

**MUDA  
BERAHLAK  
AMANAH  
DINAMIS**

**ARIE  
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA  
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

# APBD-P 2023, DPRD KALTIM SAMPAIKAN EMPAT CATATAN KEPADA PEMPROV KALTIM

**SAMARINDA** - DPRD Kaltim memberikan sejumlah catatan untuk pemanfaatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan naiknya APBD Kaltim APBD tahun

2023 yang semula Rp17,20 triliun menjadi Rp25,32 triliun, diharapkan berbanding lurus dengan pembenahan di sejumlah bidang.

Hal demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji usai memimpin Rapat Paripurna ke-33 DPRD Kaltim, Rabu (13/9/2023).

Ia mengatakan setelah mendapat jawaban Gubernur Kaltim terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait Nota Penjelasan Keuangan APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2023, ada empat hal yang mesti menjadi perhatian khusus Pemprov Kaltim.

"Ada empat hal yang penting dari jawaban Gubernur, yakni di pertanian, dan di pendidikan. Di mana 20 persen anggaran pendidikan ada Rp 4,3 triliun tapi kenyataannya kondisi fisik sekolah di Kaltim buruk. Kita minta pemprov melalui Disdik memberikan perhatian khusus SMA/SMK Negeri di Kaltim," ungkapnya.

Selanjutnya ia menyebut pada bidang infrastruktur khususnya jalan di Kaltim yang dinilai dalam keadaan yang butuh perbaikan.

"Terutama jalan dari Kubar ke Mahulu, jalan dari Tenggarong ke Tabang, mohon segera difasilitasi," jelasnya.

Tak luput, sebut Politisi Gerindra ini, yakni terkait kelistrikan di Kaltim. Ia mengungkap ada 211 desa di Bumi Etam yang belum teraliri listrik. Hal ini katanya, harus menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim, mengingat postur APBD Kaltim yang kian "gemuk".

"Masalah listrik, DPRD meminta 211 desa itu dapat dialiri lis-



Gedung DPRD Kaltim

trik. Dan kita sudah rapat dengan ESDM untuk memberikan anggaran lebih di murni 2024 agar semua desa teraliri listrik," pungkasnya.

Sebagai informasi APBD tahun 2023 semula Rp17,20 triliun menjadi Rp25,32 triliun. Anggaran pendapatan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding target yang telah ditetapkan pada APBD murni yang

Direncanakan semula Rp 14,62 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,07 triliun, sehingga perubahan APBD menjadi Rp18,69 triliun atau naik 27,88 persen.

Beberapa komponen pendapatan daerah yang mengalami perubahan adalah pada bagian PAD yang semula sebesar Rp8,04 triliun bertambah Rp999 miliar atau naik 12,43 persen, sehingga perubahan APBD menjadi Rp9,04 triliun.

Perubahan terjadi pada komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun estimasi dari masing-masing target PAD adalah pada bagian pajak daerah terdapat penambahan sebesar Rp 729,50 miliar atau naik 10,41 persen dari rencana alokasi APBD murni sebesar Rp 7,01 triliun, sehingga perubahan menjadi Rp7,74 triliun.

Pada bagian retribusi daerah, terjadi penurunan Rp2,21 miliar atau turun 11,03 persen dari rencana semula Rp20,05 miliar, sehingga perubahan menjadi Rp17,84 miliar.

Sementara untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran semula Rp232,74 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp16,99 miliar atau naik 7,30 persen, sehingga perubahan menjadi Rp249,73 miliar.

Pada lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp782,70 miliar atau naik 32,63 persen dari rencana anggaran murni sebesar Rp255,42 miliar, sehingga perubahan menjadi Rp 1,03 triliun.

**Pewarta : Andi Desky**

**Editor : Nicha Ratnasari**





# 9 RIBU KELUARGA DI PPU TERIMA BANTUAN 296 TON BERAS



**PROGRAM PBI BPJS KESEHATAN  
PEMKAB PPU DIEVALUASI,  
2024 TETAP BERJALAN**



Robbi/MediaKaltimGroup

Penyaluran beras tahap pertama dilaksanakan di Gudang BULOG Labangka Kecamatan Babulu, Rabu (13/9/2023).

## 9 RIBU KELUARGA DI PPU TERIMA BANTUAN 296 TON BERAS

PPU - Sebanyak 9 ribu lebih keluarga berisiko stunting (KRS) di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan beras. Tahun ini, ada sebanyak 296 ton beras dalam program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pusat yang digelontorkan.

Penyaluran CPP ini dalam upaya penanganan stunting di Benuo Taka. Namun, pemberian kali ini juga diperuntukkan bagi warga yang terdampak kondisi cuaca ekstrem, El-Nino.

Acara launching pendistribusian CPP Pusat berlangsung di Gudang Bulog Labangka Kecamatan Babulu, Rabu (13/9/2023). Asisten III Setkab PPU Ahmad Usman menuturkan pemberian bantuan ini untuk menekan prevalensi stunting di PPU.

"Bantuan ini harus tepat sasaran. Kami akan memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Kerja sama dan transparansi dalam proses distribusi sangat penting untuk memastikan efektivitas program ini," jelasnya.

Dalam program ini, tepatnya sebanyak 9.899 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi penerima. Tersebar di 54 desa/kelurahan di PPU.

Adapun beras yang disiapkan ialah 296.970 kilogram (296,97 ton) beras yang berasal dari Bulog. Masing-masing dari keluarga itu, menerima 10 kilogram beras

tiap bulan selama 3 bulan. Dimulai pada September hingga November 2023.

"Seluruh proses penyaluran CPP akan diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," tegasnya.

Untuk diketahui, stok CPP yang ada di Gudang Bulog wilayah PPU dan Paser mencapai 1.105 ton. Itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

"Dengan langkah ini, diharapkan masalah stunting dapat diminimalisir, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat," kata Usman.

Tak hanya itu, penyaluran CPP ini juga sejalan dengan upaya penanganan dampak cuaca kemarau dan fenomena El Nino yang cukup ekstrem dalam beberapa waktu terakhir. Ia berharap bahwa program penyaluran CPP ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat PPU, dalam membantu mengatasi permasalahan stunting yang telah lama menjadi perhatian bersama.

"Pemkab PPU berkomitmen untuk melaksanakan penyaluran CPP ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

**Pewarta : Nur Robbi**

**Editor : Nicha Ratnasari**





Robbi/MediaKaltimGroup

Rapat evaluasi BPJS Kesehatan Balikpapan bersama Pemkab PPU, di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu (13/9/2023).

## PROGRAM PBI BPJS KESEHATAN PEMKAB PPU DIEVALUASI, 2024 TETAP BERJALAN

PPU - Cakupan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 91 persen. Data kepesertaan yang ditanggung Pemkab PPU melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus di-update.

Pemkab PPU bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 2023 Rabu (13/9/2023). Kegiatan forum pemangku kepentingan utama (PKU) ini dilaksanakan setahun dua kali.

Yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN-KIS per semester. Dengan tujuan untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan para PKU. Pun, menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang muncul.

"Meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis," ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Sarman Pali-padang.

Ia menjelaskan terdapat lima agenda pembahasan pada kegiatan ini yakni progress forum PKU pada periode semester I 2023. Yakni cakupan kepesertaan, pelayanan Kesehatan, ba-

gian keuangan serta pembahasan-pembahasan.

"Semua catatan kami di semester I, hampir selesai. Seluruhnya sudah terlaksana dengan sangat baik," terangnya.

Tak hanya itu, Sarman turut mengapresiasi komitmen Pemkab PPU untuk terus menjamin kepesertaan seluruh warganya. Sekaligus memberikan solusi konkret terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.

"Kegiatan yang Kita lakukan berulang setiap tahun, ini dimana memang ada instruksi. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terkait program JKN," ungkapnya.

Senada, Sekkab PPU Tohar yang juga Ketua Forum PKU PPU mengapresiasi atas catatan kecil. Pun catatan yang muncul pada periode lalu, seluruhnya telah dipastikan terealisasi.

"Dengan memelihara dan mengendalikan kepesertaan BPJS, yang terus diupdate. Yang sudah meninggal, peserta baru atau double peserta. Juga terkait hal-hal teknis dan administrasi, lanjutkan komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemangku kepentingan (stakeholder)," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemkab PPU terus mengoptimalkan cakupan program jaminan kesehatan hingga 100 persen. Komitmen dan pengoptimalan menyangkut layanan kesehatan yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk PBI yang bersumber APBD kabupaten sekitar Rp 32 miliar pada tahun ini.

"Kami tetap harus memaksimalkan dan mempertahankan universal health coverage (UHC)," sebut Tohar.

Adapun hingga kini, terdapat sebanyak 173 ribu jiwa atau 91,78 persen penduduk yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Ia mengungkapkan, perkembangan terbaru teridentifikasi bawah ada sekira 3 ribuan jiwa penduduk PPU pemegang dan penerima manfaat BPJS PBI telah dinonaktifkan.

Sedangkan realisasi atau progres kepesertaan baru BPJS PBI APBD PPU, pada semester pertama 2023, mencapai sekira 100 orang peserta baru.

"Mudah-mudahan program ini ke depan masih ada ditunjang dengan kekuatan APBD PPU. Alokasi anggaran untuk tahun depan kurang lebih sama dengan tahun ini," tutupnya.

**Pewarta : Nur Robbi**

**Editor : Nicha Ratnasari**

# GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DIHARAPKAN MAMPU SELESAIKAN SENGGKETA LAHAN PPU

PPU - Di Penajam Paser Utara (PPU) belakangan bermunculan berbagai konflik sengketa lahan. Sebagai upaya solutif, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) PPU diharapkan turut mengurai permasalahan ini.

Pemkab PPU menggelar rapat koordinasi GTRA di Hotel Aqila, Rabu (13/9/2023). Dihadiri Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan, Dandim 0913 PPU Letkol Inf Arfan Affandi, Kepala Bapelitbang PPU, Tur Wahyu, Badan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta sejumlah pejabat terkait lainnya di lingkup Pemkab PPU.

Kegiatan ini dibuka Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setkab PPU Sodikin, mewakili Bupati PPU, Hamdam Pongrewa. Tema yang diangkat tahun ini, 'Membangun sinergitas lintas sektor dalam rangka kepastian hukum hak atas tanah guna mewujudkan reforma agraria yang aman, nyaman, dan produktif serta berkelanjutan'.

"Reforma agraria merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses. Sehingga penyelenggaraan reforma agraria perlu dukungan dan keterlibatan kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma agraria secara optimal," jelasnya.

Adapun rapat koordinasi dilakukan dalam rangka membangun sinergitas lintas sektor. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan reforma agraria di wilayah PPU.

Pemerintah daerah tergabung dalam GTRA nantinya bertugas membagikan lahan seluas 1.883 hektare kepada masyarakat setempat. Lahan itu diketahui ada di atas hak pengelolaan lahan (HPL) 4.162 hektare yang dikelola



(Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)  
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria PPU diadakan di Hotel Aqila, Rabu (13/9/2023).

Badan Bank Tanah.

Sementara lahan 4.162 hektare yang dikelola Badan Bank Tanah merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA). Berada di wilayah Kelurahan Riko, Jenebora, Gersik dan Pantai Lango di Kecamatan Penajam dan Kelurahan Maridan di Kecamatan sepaku.

"Program reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan warga setempat," terang Sodikin.

Lebih lanjut, masalah agraria merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati. Karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah.

Pasalnya, pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengantisipasi permasalahan agraria. Seperti ada beberapa lahan garapan milik masyarakat setempat yang masuk dalam kawasan lahan Badan Bank Tanah.

"Banyaknya jumlah sengketa dan konflik agraria yang terjadi

saat ini," sebutnya.

Oleh karena itu, posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan sangat dibutuhkan. Yang mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Juga agar ke depannya permasalahan agraria sudah tidak ada.

"Sangat membutuhkan perhatian serius, selain kelembagaan, penanganan sengketa agraria juga perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar dalam implementasinya tidak menimbulkan benturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya," sambung Sodikin.

Ia berharap dengan adanya kegiatan reforma agraria di PPU dapat menyelesaikan konflik dan sengketa lahan yang berada di Kabupaten daerah. Dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai usaha bersama untuk mencapai tujuan reforma agraria.

"Kegiatan ini juga hendaknya menjadi wadah evaluasi terkait sejauh mana pencapaian program reforma agraria di kabupaten PPU," pungkasnya.

**Pewarta : Nur Robbi**

**Editor : Nicha Ratnasari**





Deddy/RadarMedia

Sekretaris Umum Partai Gelora Kaltim, Sarwono.

## GELORA TARGETKAN 5 KURSI DI DPRD PPU, BAKAL USUNG CALON KEPALA DAERAH

**PPU** – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Konsolidasi Daerah dan Pembekalan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Sabtu (9/9/2023) lalu.

Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Umum Gelora Kalimantan Timur (Kaltim) Sarwono tersebut membahas mengenai target pencapaian pada Pileg mendatang dan menyentil tentang pengusungan calon Kepala Daerah mendatang.

Saat dikonfirmasi terkait target yang akan dicapai pada Pileg 2024 mendatang, Sarwono mengatakan pasti Gelora memiliki target tersendiri terhadap Pileg mendatang. Apalagi melihat PPU yang terbilang seksi dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“PPU ini kan seksi dengan hadirnya IKN, pastinya kami memiliki target tersendiri terhadap pileg mendatang. Target tersebut ialah 5 kursi di DPRD PPU,” ungkapnya, Selasa (12/9/2023).

Ini bukanlah target main-main, dalam artian para bacaleg juga dituntut

untuk serius dalam pencalonan dirinya bukan hanya sekedar memenuhi kuota saja.

“Dengan target ini kan, para bacaleg harus serius dalam pencalonan dirinya. Hal ini bukan hanya sekedar target yang kita inginkan, akan tetapi target ini pasti memiliki strategi khusus yang akan kita lakukan di lapangan nanti,” jelasnya.

Target 5 kursi DPRD PPU ini akan terbagi di beberapa Daerah Pilihan (Dapil) di setiap Kecamatannya. Diberikan, Kecamatan Penajam targetkan 2 kursi, Kecamatan Waru-Babulu 2 kursi dan Kecamatan Sepaku 1 Kursi jadi semuanya terpenuhi menjadi 5 kursi. Dengan itu Gelora dapat mengusung calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024 mendatang.

“Pasti target tersebut terbagi di setiap dapilnya. Dapil Penajam 1 kursi, Waru-Babulu 2 kursi dan Sepaku 1 Kursi. Dengan target 5 kursi ini Gelora dapat mengusung calon kepala Daerah sendiri pada pilkada 2024 mendatang,” tutupnya.

**Pewarta : Deddy**

**Editor : Nicha Ratnasari**



## TERTIBKAN PKL, SATPOL PP BONGKAR PAPAN PENUTUP DRAINASE DEPAN TERMINAL JONGGON



**BAPEMPERDA OPTIMIS TUNTASKAN 25 RAPERDA PRIORITAS SEBELUM AKHIR TAHUN**





Foto : Sejumlah personel Satpol PP Kukar yang membongkar papan yang terpasang di atas drainase, yang menjadi lokasi PKL berjualan.

## TERTIBKAN PKL, SATPOL PP BONGKAR PAPAN PENUTUP DRAINASE DEPAN TERMINAL JONGGON

**TENGGARONG** - Penertiban sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), di depan Terminal Jonggon, di Jalan Danau Semayang, Kelurahan Melayu, Tenggaraong dilakukan oleh puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar, pada Rabu (13/9/2023) pagi.

Kasi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol PP Kukar, Endang Purwanto, menyebut penertiban dilakukan dengan membongkar sejumlah penutup drainase yang terbuat dari kayu. Diketahui, kayu-kayu tersebut dibuat oleh para PKL untuk dijadikan lapak dadakan. Baik itu seperti SOL sepatu, jasa pembuatan stempel, pembuatan kunci hingga penjual buah-buahan.

Selain terlihat kumuh, juga terletak di atas drainase. Sehingga menyulitkan petugas kebersihan untuk membersihkan saluran drainase, dan menyebabkan debit air tinggi.

“Di depan Terminal Jonggon itukan sudah kelihatan kumuh. Mulai sekarang ada perubahan, mau kita tata dan kita bersihkan dari PKL-PKL terutama yang di atas parit itu,” ujar Endang pada mediakaltim.com.

Diakui Endang, Pemkab Kukar melalui Satpol PP sudah berulang kali mensosialisasikan hal tersebut. Bahkan sempat melakukan operasi razia pada tahun 2022, dan tidak sedikit PKL yang terjerat dan disidang. Puluhan PKL tersebut dikenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Namun memang karena tuntutan ekonomi, PKL tetap “kucing-kucingan” kembali berjualan ditempat serupa.

PKL yang kembali kedapatan berjualan di atas drainase, diminta untuk segera membersihkan dan mengangkat barang-barang jualan mereka. Kemudian papan di atas drainase dibongkar dan dihancurkan.

“Untuk sementara di daerah

depan terminal kemudian lanjut di daerah Jalan Maduningrat, karena harus steril, selama pembangunan pasar itu tidak boleh lagi mereka jualan di sana,” lanjut Endang.

Pemkab Kukar pun sebenarnya sudah menyiapkan lokasi untuk para PKL bisa menjajakan dagangannya, baik di Pasar Mangkurawang maupun di dalam lokasi Terminal Jonggon. Namun lagi-lagi karena alasan sepi pembeli, membuat mereka memberanikan diri untuk berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

“Sebenarnya tahapannya sudah jelas, kalau sudah 2-3 kali mereka tidak mengindahkan akan ada razia seperti tahun lalu. Itu juga mengganggu proses pembangunan pasar,

suatu saat kalau pasar itu jadi kan mereka tidak boleh berjualan disana,” tutup Endang.

**Penulis : Muhammad Rafi'i**  
**Editor : Nicha Ratnasari**

Ketua  
Bapemperda  
DPRD Kukar,  
Ahmad Yani.



Rafii/Media Kaltim

## Upaya Selamatkan Aset Daerah, DPRD Kukar Dorong Pembahasan Dua Raperda

**TENGGARONG** - Sebanyak 25 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023 akan dituntaskan DPRD Kukar, hingga akhir tahun. Namun ada beberapa raperda yang dianggap paling penting untuk segera dibahas dan disahkan menjadi perda.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut setidaknya ada dua raperda yang langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Di mana menyangkut kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lebih lanjut, perlu ada aturan-aturan yang menaungi aset-aset milik daerah yang berada disana, sehingga ketika masuk dalam wilayah IKN, tidak begitu saja diserahkan ke Badan Otorita IKN.

Ia mencontohkan terkait BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), yang diketahui mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen dari aktivitas migas. Ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tidak meriv-

isi perda yang sudah mengatur, maka potensi kehilangan 10 persen yang sudah dinikmati sebagai sumber pendapatan bisa saja hilang dan lepas begitu saja.

"Oleh karena itu, ini menjadi fokus kita terkait dengan revisi perda MGRM," ungkap Ahmad Yani.

Selain itu, terkait perubahan perda penyertaan modal ke BUMD PT Tunggang Parangan (Perseroda). Dalam rangka memasukan aset daerah yang dimiliki oleh Pemkab Kukar dan memiliki nilai tinggi. Seperti Pelabuhan Amborawang yang terletak di Kecamatan Samboja, yang menjadi bagian dari wilayah IKN nantinya. Diperkirakan senilai Rp 400 miliar, untuk bisa dikelola oleh PT Tunggang Parangan.

Karena dijelaskan oleh Yani, jika memang tidak segera dikelola oleh BUMD dan tetap atas nama Pemkab Kukar, maka kemungkinan besar akan dieksekusi dan diambil oleh Badan Otorita IKN.

"Sehingga, harapan besar DPRD melalui Bapemperda bagaimana revisi perda penyertaan modal ini kemudian mengisi aset Pelabuhan

(Amborawang) Samboja itu bisa dikelola oleh BUMD," lanjut Yani.

Karena dianggap lebih menguntungkan Pemkab Kukar, jika dikelola oleh BUMD. Akan ada nilai kerjasama yang bisa menjadi Pemasukan Asli Daerah (PAD) bagi Kukar, meski berada di wilayah IKN.

"Sehingga, ini adalah sangat penting dan mendesak. Kemudian kita juga akan membahas bersama bupati seperti apa tanggapannya, minimal aset ini selamat Rp 400 miliar," timpalnya.

Tak hanya keberadaan Pelabuhan Amborawang Samboja saja, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti (RSUD ABADI), pun memiliki kesempatan serupa. Diupayakan bisa turut dikelola oleh BUMD, tetap menjadi Pemkab Kukar. Walaupun masuk wilayah IKN, Pemkab Kukar tetap bisa mendapatkan pundi-pundi PAD.

"Saya rasa dua perda itu yang sangat fokus kita bahas yang mendesak dan sangat penting," tutup Yani. (adv)

**Penulis : Muhammad Rafii**  
**Editor : Nicha Ratnasari**





Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani.

## Bapemperda Optimis Tuntaskan 25 Raperda Prioritas Sebelum Akhir Tahun

**TENGGARONG** - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sedang berfokus menyelesaikan target peraturan daerah, yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.

Sebanyak 25 raperda, optimis akan selesai tepat waktu. Termasuk raperda-raperda di luar Propemperda 2023, seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Ahmad Yani.

Yani menjelaskan, kini sudah 75 raperda yang sudah selesai dan sedang tahapan pembahasan di DPRD Kukar. Sementara 25 persen raperda lainnya, akan segera dibahas.

“Kalau yang lain sudah berproses dan itu sudah ditangani panus dan tinggal difasilitasi dengan provinsi, setelah itu disahkan,” ungkap Yani pada mediakaltim.com, Rabu (13/9/2023).

Disebutkan, ada sebanyak 4

raperda yang dianggap perlu untuk segera dibahas bersama di DPRD Kukar. Namun ujar Yani, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar belum kunjung menyampaikannya. Di antaranya terkait pajak, retribusi daerah, hingga raperda terkait Badan usaha Milik Daerah (BUMD).

Begitupun dengan raperda-raperda yang di luar Propemperda 2023, akan tuntaskan. Selain bersifat wajib, pengesahannya pun hanya tinggal menunggu jadwal dari DPRD Kukar untuk disidangkan secara paripurna. Seperti Perda APBD tahun 2024, Perda APBD Perubahan Kukar 2023, Perda Pertanggungjawaban APBD 2022.

“Maksudnya itu di luar Propemperda, jadi ada 25 raperda yang memang harus kita selesaikan di tahun ini,” tutup politisi PDI Perjuangan itu. (adv)

**Penulis : Muhammad Rafi'i**

**Editor : Nicha Ratnasari**



# **BCC BAKAL KEMBALI DIGELAR DENGAN PERUBAHAN KONSEP**

**BACA HALAMAN A2**



## **MAYAT PENCARI KEPITING DITEMUKAN DI RAWA-RAWA SUNGAI KS TUBUN**





IST

Gelaran BCC di Tahun 2022 lalu.

# BCC Bakal Kembali Digelar dengan Perubahan Konsep

**BONTANG** – Event Bontang City Carnival (BCC) akan kembali diadakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bontang Oktober mendatang. Terdapat sedikit perubahan konsep, pada event yang sudah terselenggara beberapa tahun belakangan ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Bambang Cipto Mulyono menjelaskan, bahwa karnival dengan pawai budaya nantinya akan dibedakan.

"Nanti di karnivalnya dulu, jadi mereka tidak perform, yang perform nanti pawai budaya itu," jelasnya.

Pawai budaya nantinya akan menggunakan baju adat dan menampilkan

beberapa pertunjukan, lalu karnival menggunakan pakaian yang bersifat kesenian kontemporer. Sistematisnya tetap dilakukan bersamaan, hanya saja penampilannya akan lebih dulu karvinar baru pawai budaya, atau sebaliknya.

Disdikbud sendiri mendapatkan rekomendasi untuk menambahkan kendaraan hias. Namun Bambang tidak dapat menggabungkan, lantaran asap kendaraan yang dapat terkena peserta pejalan kaki di belakang mobil hias.

"Kami sarankan kendaraan hias bisa dilaksanakan untuk event besar lainnya, mungkin saat 17 Agustusan," jelasnya.

Adapun masukan terkait waktu pelaksanaan, yakni pagi hari seperti tahun

lalu, atau malam hari. Dengan banyak pertimbangan disdikbud berharap agar waktu pelaksanaan tetap dilakukan pagi hari.

"Kalau malam hari seperti beberapa tahun yang lalu itu kurang kondusif, untuk segi keamanan juga kurang. Jadi kami terapkan rekomendasi untuk pagi," tambahnya.

Selain itu, Disdikbud tidak mengangarkan adanya tambahan untuk penempatan jalan. Diskusi dengan Satpol PP juga harus dilaksanakan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung memutuskan untuk dilaksanakan malam hari.

**Penulis: Syakurah**  
**Editor: Yusva Alam**





YUSVA ALAM

Sidak Komisi I DPRD Bontang ke proyek pembangunan Kantor Lurah Satimpo, Rabu (13/9/2023).

## Proyek Pembangunan Kantor Lurah Satimpo Belum Capai Target

**BONTANG** – Sidak kembali digelar Komisi I DPRD Bontang terkait progres pembangunan Kantor Kelurahan Satimpo di Lapangan HOP 1, Kecamatan Bontang Selatan, Rabu (13/9/2023).

Hasil sidak tersebut, progres pembangunan kantor baru mencapai 48 persen dari target yang seharusnya dicapai September ini yakni 50 persen. Proyek ini sudah dikerjakan selama 4 bulan dan ditarget harus selesai pada 30 November 2023.

"Masih minus dari target, semoga bisa selesai tepat waktu," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking.

Tak hanya itu, dari hasil Sidak tersebut ditemukan 12 pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, serta tidak memiliki BPJS

Ketenagakerjaan. Menurut Raking, APD merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi demi keselamatan para pekerja.

"Harusnya keselamatan tenaga kerja diperhatikan. Masa tidak pakai pengaman, cuma pakai sandal saja. Khawatirnya membahayakan keselamatan pekerja, apalagi tidak ada BPJS nya. Kami bisa setop pekerjaan kalau begini kondisinya," tegasnya.

Sementara itu, Site Manager Kontraktor Pelaksana CV Nuraini, Laode Winardi beralasan, terlambatnya pengerjaan ini dikarenakan ada perubahan tempat pembangunan awal, sehingga harus merubah semua desain bangunan.

"Karena gambar awal pembangunannya kan di depan, ternyata pindah di

belakang. Kami harus ubah semua desainnya dari awal, karena tempat awal dan yang sekarang ini beda strukturnya," ungkapnya.

Selain itu, keterlambatan material dan minimnya tenaga kerja pembantu (helper) serta juga main power menjadi salah satu penyebab pengerjaan proyek tersebut masih minus dari target.

"Tenaga kerja kami ada 20, itu sudah termasuk tukang dan helper. Kami belum bisa tambah karena menyesuaikan anggarannya. Kendalanya di situ," terangnya.

Masalah APD dan BPJS Ketenagakerjaan, pihak akan segera melengkapi kekurangan itu. "Segera kami usulkan ke atasan. Kami usahakan Minggu depan akan terpenuhi semua," tandasnya. (al/adv)





YUSVA ALAM

Para peserta mengikuti briefing sebelum memulai pelatihan.

## Dukung Pembangunan IKN, 50 Tukang di Bontang Belajar Pasang Baja Ringan

**BONTANG** – Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kantor PU lama di Jalan DI Pandjaitan, Kelurahan Bontang Baru, Rabu (13/9/2023).

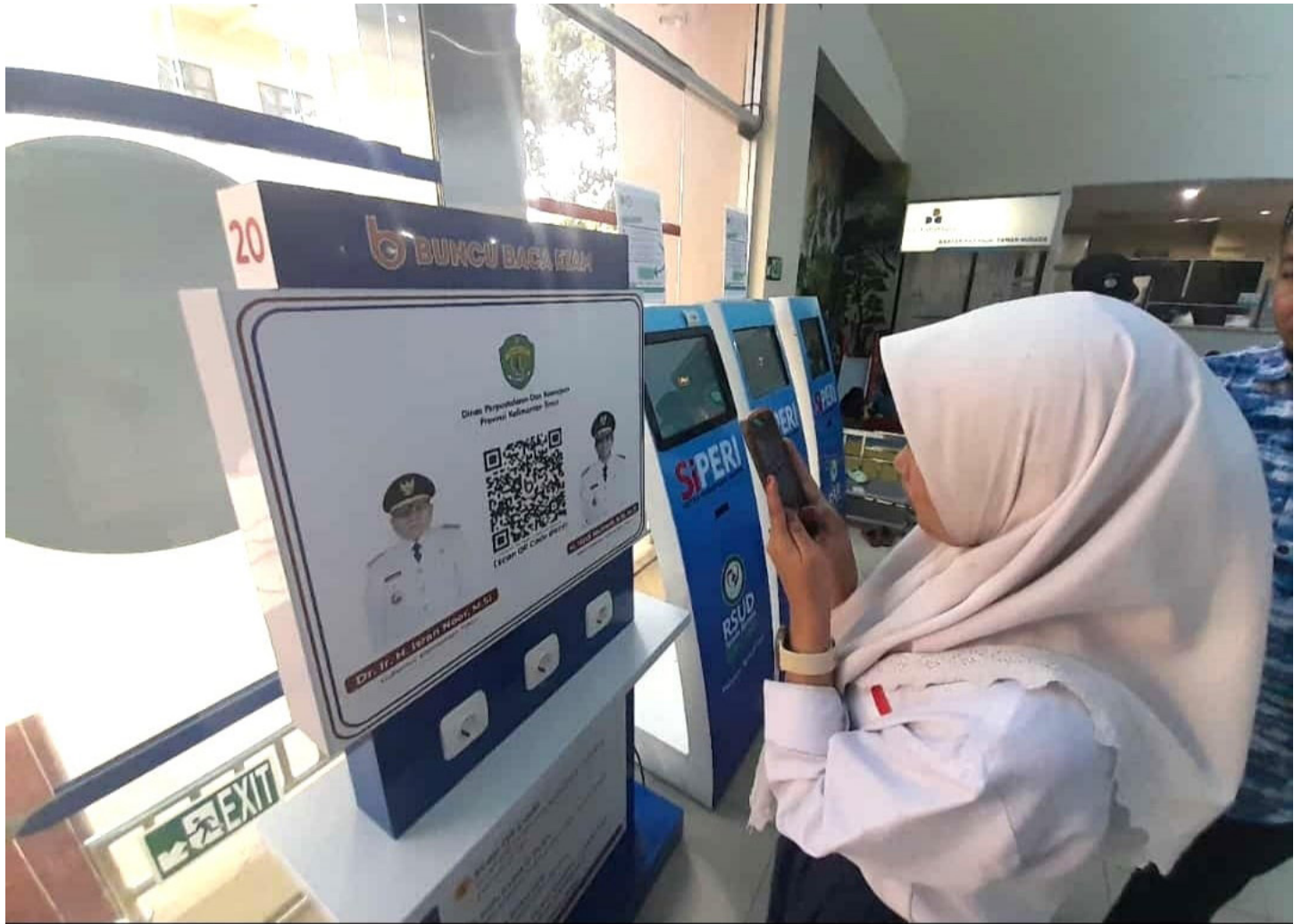
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dedy Nugraha menjelaskan, kegiatan ini merupakan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) yang diteruskan oleh bidang bina konstruksi PUPR Bontang.

Kegiatan diadakan selama 6 hari sejak tanggal 11-16 September 2023. Di Hari Rabu ini para peserta baru memulai untuk materi praktek, sementara 2 hari sebelumnya para peserta mengikuti materi teori.

“Para peserta ini diberikan keterampilan untuk pemasangan atau instalasi baja ringan jenjang 1. Tidak hanya atap saja, namun juga kanopi dan dinding. Nantinya sertifikasi yang dimiliki dapat digunakan tak hanya mendukung pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN), namun bisa dipakai di seluruh wilayah di Indonesia,” beber Dedy.

Di pelatihan ini seluruh peserta tidak dipungut biaya sepeserpun. Warga non pendidikan, SD atau SMP diperkenankan mendaftar. Namun dengan syarat berpengalaman di bidang tukang selama 2 tahun.

Nantinya para peserta akan mendapatkan fasilitas berupa sertifikat pelatihan Kementerian PUPR, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari BNSP, Alat Pelindung Diri (APD), dan konsumsi. (al/adv)



Perpustakaan digital anjungan Buncu Baca Etam saat digunakan salahsatu pengunjung.

## Perpustakaan Digital, Fasilitas Terbaru di Ruang Tunggu RSUD Taman Husada

**BONTANG** - RSUD Taman Husada Kota Bontang memberikan fasilitas terbaru kepada para pengunjung yang sedang mengantri, atau pasien yang sedang berobat berupa perpustakaan digital.

Perpustakaan tersebut berupa barcode yang diletakkan tidak jauh dari pintu masuk. Berdekatan dengan ruang tunggu. Bisa diakses menggunakan scan barcode yang ada di smartphone.

"Per tanggal 13 September 2023 pengunjung RSUD dapat menikmati anjungan Buncu Baca Etam yg merupakan proyek hibah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim," jelas dr. Siti Aisyatur Ridha, Humas RSUD Taman Husada Bontang saat dihubungi redaksi.

Bila dilihat artinya, Buncu Baca Etam

diambil dari Bahasa Kutai yaitu Pojok Baca Kita, namun prinsipnya secara digital. Seperti halnya E-perpusnas, pengguna dapat memilih berbagai jenis buku yang ada sekitar 600 lebih buku.

"Jadi dalam perpustakaan digital ini menyediakan berbagai macam buku, dan buku-buku tersebut bisa untuk semua umur," jelasnya.

Tentu karena telah memasuki zaman yang sudah serba canggih, rumah sakit pun harus ikut berkembang, tidak hanya dari segi teknologi pengobatan, tapi juga fasilitas penunjang lain, seperti perpustakaan digital tersebut.

"Anak-anak juga rata-rata sudah bisa pegang gadget, dan jarang membaca, bahkan memegang buku, begitu juga orang dewasa, jadi kita berikan akses ini untuk mereka," tutupnya.

Pengguna anjungan ini, baik pengunjung maupun karyawan RSUD patut bersyukur, mengingat di Bontang hanya 3 instansi yg terpilih untuk pemanfaatan anjungan buncu baca etam ini.

Pengguna dapat menggunakan fasilitas baca gratis E-buku dengan cara melakukan scan QR, dan berada di area 200 meter dari lokasi titik anjungan. Lalu pengguna tersebut dapat bebas memilih buku, baik itu buku cerita anak, pengetahuan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Semoga dengan adanya layanan baca gratis ini, akan meningkatkan minat baca dan semangat literasi dari pengunjung RSUD Taman Husada. Selain memanfaatkan waktu luang saat menunggu panggilan dokter, maupun panggilan apotek ataupun disaat menunggu keluarga yang sakit. (sya/adv)





Almarhum  
Kartolo  
Rimba  
(kanan)  
semasa  
hidup ber-  
sama Udin  
Mulyono.

## Mantan Ketua PHM Bontang Kartolo Rimba Meninggal Dunia, Ramai Ucapan Duka di Dunia Maya

**BONTANG** – Berita duka menyelimuti dunia maya pagi ini. Kartolo Rimba, sosok yang dikenal luas di kalangan masyarakat Kota Bontang, meninggal dunia.

Kartolo Rimba, mantan Ketua Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kota Bontang selama ini juga dikenal cukup kritis dan selalu terlibat di kegiatan kemasyarakatan.

“Innalilahi wainnailahi rojiun telah berpulang ke Rahmatullah bapak Rahmat Kartolo jam 5 .15 wita subuh tadi (14/9) di RS Kanujoso Balikpapan. Semoga almarhum diterima seluruh amal ibadahnya dan semua dosanya diampuni. Aamiinnn YRA,” tutur H Ghalib, pengusaha Kota Bontang dalam postingannya di grup whastapp.

Kabar duka juga disampaikan Anggota DPRD Bontang Faisal yang membagikannya di akun Facebooknya.

“Pagi-pagi Buka FB dan dapat kabar Om Kartolo Rimba meninggal dunia. Selamat jalan Om Kartolo Rimba. Semoga segala dosa-dosa Om diampuni dan segala amal baik Om diterima Allah SWT, Om Kartolo orang baik InshAllah, surga tempat Om,” ucap Faisal.

Tak butuh waktu lama, kabar tersebut langsung mendapat berbagai respons dari netizen lainnya.

Banyak yang mengungkapkan rasa dukacitanya dengan mengucapkan “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun,” sebagai bentuk bela sungkawa.

Dian Sandora, salah satu netizen, mengungkapkan harapannya agar almarhum mendapatkan husnul khatimah.

Sementara itu, Yokohama menuliskan, “Beliau sosok sahabat yang baik. Al-Fatihah untuk almarhum.”

lim CUek SangAdd menyebutkan bahwa kabar meninggalnya Om Kartolo Rimba telah ramai dibicarakan di berbagai grup.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Renny Hutagaol yang mengenang momen-momen bersama almarhum saat Pilkada, “Msh ingat wkt kita Pilkada.. Seperjuangan.. Hari2 kita nongki di PHM Mangga. Semoga Husnul khotimah. Selamat jln Pak Kartolo.”

Banyak netizen yang turut mendoakan agar segala amal baik almarhum diterima oleh Allah SWT, dosa-dosanya diampuni, dan ditempatkan di surga bersama orang-orang yang beriman. Selain itu, mereka juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini.

**Penulis/Editor: Agus Susanto**

# Pemkot Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Korsel

**BONTANG** – Pemkot Bontang bersama dengan Tim Project Identification Survey (PIS) Provinsi Jeju, Korea Selatan bekerjasama pengelolaan sampah di Kota Bontang, Rabu (13/9/2023) di Pendopo Rujab Wali Kota.

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan, penanganan sampah di Bontang membutuhkan program pengelolaan yang komprehensif dan terpadu, karena tumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sudah harus dikendalikan.

"Sampah di Kota Bontang mencapai 80 ton lebih pertahunnya," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan penumpukan sampah perhari serta luas lahan TPA, diperkirakan umur TPA tidak sampai lima tahun. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi pengolahan sampah di perkotaan.

Hasil dari kunjungan lapangan tim dari Jeju nantinya diharapkan, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, sehingga sampah yang dihasilkan hanya ditimbun.

Inovasi tersebut berupa pemilahan dan pengolahan sampah berdasarkan jenisnya. Seperti program Waste to Energy untuk pengolahan sampah organik menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas umum di lokasi sekitar.

Kemudian, program Waste to Wealth untuk pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai produk bernilai guna, yang dapat meningkatkan perekonomian pengelola sampah.

Lalu, pengolahan residu dengan proses insinerasi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Terakhir program pengembangan RDF (Refused Derived Fuel), untuk menjadikan sampah sebagai salah satu sumber substitusi bahan bakar sebagian untuk co-firing pembangkit listrik dan boiler.

Direktur Jeju Internasional Development Cooperation Center (JIDCC), Eui-chul Shin mengatakan, bahwa sistem pengolahan sampah yang sudah dilakukan di Jeju sejak 2005 lalu dinilai berha-

sil, sehingga kota Bontang dipilih untuk melaksanakan program yang sama.

Apabila Kota Bontang memenuhi kriteria, maka Bontang akan menerima bantuan dana hibah sebesar 10 juta US Dollar, untuk biaya pengembangan pengelolaan sampah.

"Biaya ini terbilang kecil, karena itu bukan hanya untuk pembelian alat pelaksanaannya, tapi kita akan mulai dari pendidikan anak-anak di sekolah," jelasnya.

Di Jeju sendiri tidak serta merta hanya memberikan edukasi kepada warga dalam waktu singkat kemudian di terapkan, namun dengan pembentukan kebiasaan sejak dini di sekolah, tentu diharapkan akan berhasil walaupun tidak bisa dalam waktu yang singkat.

Pun begitu, saat tim Jeju datang ke Bontang, ia mengapresiasi tidak adanya sampah yang berserakan di jalanan.

"Sejak kemarin kami di sini tidak ada sampah yang berserakan, saya kagum," ucapnya.

**Penulis: Syakurah**  
**Editor: Yusva Alam**







Mayat saat ditemukan Rabu siang ini.

## Mayat Pencari Kepiting Ditemukan di Rawa-Rawa Sungai KS Tubun

**BONTANG** – Ditemukan sesosok mayat pria, Rabu (13/9/2023) sore sekira pukul 14.00 wita di pinggir Sungai KS Tubun. Lokasinya mendekati Pasar Rawa Indah. Saat ini mayat sudah dibawa ke RSUD Taman Husada untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan.

Bhabinkamtibmas Tanjung Laut Indah, Aiptu Mulyo menjelaskan kronologis kejadian. Mayat yang diketahui bernama Fahri tersebut ditemukan oleh seorang pencari kepiting bernama Margo.

Sejak pagi sampai sore tadi Margo biasa melakukan pekerjaannya mencari kepiting. Diantar oleh anaknya di Pelabuhan Tanjung Laut, lalu Margo menyusuri sepanjang sungai hingga ke Sungai KS Tubun. Saat di

Sungai KS Tubun inilah Margo melihat sesosok mayat tergeletak di rawa-rawa pinggir Sungai KS Tubun.

"Saat Margo mengecek mayat itu, ternyata dia mengenali mayat itu yang sama-sama berprofesi pencari kepiting," ujar Aiptu Mulyo.

Kemudian Margo memanggil warga sekitar dan petugas kepolisian untuk membantu mengevakuasi mayat. Saat ini mayat Fahri sudah dibawa ke RSUD Taman Husada dan ditemui keluarganya.

"Belum ada kejelasan apa penyebab meninggalnya. Masih dilakukan pemeriksaan. Tapi kata anaknya almarhum Fahri memang memiliki riwayat penyakit," bebernya.

**Penulis/Editor: Yusva Alam**



**TERUS TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,  
MEILIANA: MARATUA BAKAL DAPAT  
USD 50 JUTA ATAS PENJUALAN KARBON LAUT**



**AGUS TANTOMO SIAP BANGUN BUMI  
BATIWAKKAL DARI SENAYAN**



# TERUS TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MEILIANA: MARATUA BAKAL DAPAT USD 50 JUTA ATAS PENJUALAN KARBON LAUT

**TANJUNG REDEB** - Ketua Tim Percepatan Pembangunan Maratua, Meiliana menyebut Kecamatan Pulau Maratua akan mendapat USD 50 juta dari Bank Dunia hasil dari penjualan karbon laut.

Ia membeberkan, seluruh dokumen yang diperlukan sudah siap, tinggal melengkapi sertifikasi blue bond. "Kalau sudah siap dan diakui dunia, maka dana sekisar USD 50 juta itu akan diberikan ke Kecamatan Pulau Maratua," ungkapnya, Selasa (12/9/2023).

Dirinya menyebut, pihaknya selama 6 tahun ini menghasilkan nilai tambah kesejahteraan untuk Kabupaten Berau, terkhusus Pulau Maratua lewat blue carbon atau karbon biru.

"Hal itu seiring dengan Gubernur Kaltim, Isran Noor yang menggaungkan karbon di daratan," jelasnya.

Konsep ekonomi biru dijelaskan, ditujukan untuk kesejahteraan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan pengawasan perairan dapat dibentuk lembaga semacam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga lebih fleksibel dalam peningkatan pelayanan jangka panjang.

Pengembangan ekonomi biru di fokuskan pada program pemeliharaan atau konservasi. Seperti, lingkungan perairan, yakni terumbu karang, lamun, plankton, dan mangrove. Dengan sertifikasi blue bond.

Yang mana dalam hal ini Berau telah kolaborasi dengan sejumlah pihak, baik dalam maupun luar negeri, salah satunya dengan Republik Seychelles.

"Memungkinan supaya cepat,



Kecamatan Pulau Maratua bakal mendapat USD 50 juta dari Bank Dunia.

kita menyerahkan dokumen serta sertifikasi blue bond ke duta besar Seychelles untuk mengamankan supaya tidak lepas," terangnya.

Dibeberkannya, setelah mendapatkan sertifikasi BON, maka akan dihitung mekanisme karbon biru dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pihaknya tentu mengharapkan percepatan infrastruktur, jalan, listrik, dermaga dan transportasi udara dan laut. Serta kemandirian ekonomi dan pengembangan investasi di Maratua.

"Percepatan kebutuhan infrastruktur tersebut akan kami pantau terus," tegasnya.

Di samping itu, pihaknya akan tetap bekerja sama dengan resort-resort yang ada di Maratua untuk bisa membangun dan memasukan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal Maratua. Dengan catatan sudah mendapat pelatihan dan pendampingan dari Bank Indonesia (BI).

"Seperti bagaimana cara pengemasan agar bisa masuk ke

resort," sebutnya.

Selain pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan maka pengembangan dan pemanfaatan maka perairan di Kabupaten Berau khususnya Maratua melalui program ekonomi biru dmenjadi peluang terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Dahniar Ratnawati menyampaikan, luas wilayah Berau sebanyak 70 persennya merupakan lautan. Hanya saja berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 pengelolannya hanya sampai 12 mil.

"Kita sudah berkomitmen untuk menjaga wilayah perairan laut kita. Reward yang kita dapat berupa insentif dari bank dunia," imbuhnya.

"Maka sangat disayangkan sekali apabila kita tidak menjaga dan mengelola potensi laut kita," sambungnya. (mnz/dez)

**Pewarta: Amnil Izza**  
**Editor: Dezwan**

# AGUS TANTOMO SIAP BANGUN BUMI BATIWAKKAL DARI SENAYAN

**TANJUNG REDEB** - Nama Agus Tantomo didapuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk maju menjadi calon legislatif (Caleg) anggota DPR RI dapil Kalimantan Timur, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Agus Tantomo mengaku optimistis untuk maju ke DPR RI. Apalagi belum pernah ada putra daerah asal Berau yang pernah duduk di kursi legislatif pusat. Bahkan sudah 11 kali pemilu, secara tidak sadar masyarakat Berau selalu memilih orang luar.

Beberapa orang Berau memang pernah maju dan mencalonkan diri, tapi gagal karena tidak cukup mengantongi suara.

Namun jika berbicara soal karier, nama Agus Tantomo sendiri cukup dikenal baik pada legislatif maupun eksekutif. Dia lebih dulu memulai karier politiknya dengan menjabat sebagai anggota DPR Kaltim periode 1999-2004 lalu membawa Partai PDIP.

Sementara, pada eksekutif pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Berau periode 2016-2020. Kemudian pada 2021, Dia menjabat sebagai Bupati Berau menggantikan almarhum Bupati Mu-harram dengan masa jabatan yang sangat singkat yakni dari 9 Januari 2021-17 Februari 2021.

Selain itu, dia juga pernah menduduki jabatan pelaksana tugas (Plt) Bupati Berau masa jabatan 5 Desember 2020-9 Januari 2021 dan 22 September 2020-26 September 2020.

Ini merupakan kali keduanya nyaleg setelah 15 tahun lalu. Persiapannya sendiri sudah dilakukan selama kurang lebih satu setengah tahun lamanya. Pada 7 bulan pertama dirinya fokus meminta dukungan di lingkup partai. Setelah itu berkeliling hampir ke semua kampung di Berau menyiapkan perangkat partai dan menyampaikan akan maju ke DRI RI.

"15 tahun lalu saya pernah maju ke DPR RI, ini yang kedua,



Agus Tantomo.

1st

memang berat. Mudah-mudahan tidak perlu sampai yang ketiga," candanya.

"Dukungan kuat dari partai mulai dari DPP sampai di daerah. Insha Allah Nasdem kuat di Berau dan saya benar-benar mengandalkan orang Berau," katanya, belum lama ini.

Niat yang kuat untuk membangun Bumi Batiwakkal tercinta dari pusat menjadi bekal baginya untuk maju ke DPR RI. Dengan itu, Dia yakin bisa menjalankan tiga fungsi utama wakil rakyat. Yakni, pengawasan, legislasi atau membuat peraturan dan hak anggaran.

Pembangunan suatu daerah bersumber dari 3 dana utama, meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Pembangunan Kabupaten Berau sendiri ta-

hun ini masih mendapat kucuran dana dari APBD Kabupaten dan APBD provinsi. Mengingat Berau masih memiliki satu anggota DPR Kaltim yang mampu menggiring anggaran ke Berau.

Utamanya, APBD Provinsi untuk kemajuan Kaltim, yang dibagi kepada 10 kabupaten/kota. Dalam penentuannya tentu melibatkan 55 orang DPR Kaltim. Maka yang menjadi pertanyaan, adakah APBD Provinsi yang nilainya mencapai Rp 20 triliun itu digiring ke Berau? Mungkin ada, meski menurutnya sebagian besar tidak. Karena kecenderungan para anggota DPR akan menggiring ke kampungnya masing-masing.

Peluang menggiring anggaran dari pusat ke Berau itulah yang akan dipakai untuk mema-



## Lanjutan Agus Tantommo

jukan Bumi Batiwakkal tercinta. Dengan tidak adanya orang Berau yang duduk dikursi legislatif, tanpa disadari tidak ada juga yang menggiring APBN itu ke Berau. Padahal nilai APBN tahun ini mencapai Rp 2.400 triliun dan Berau tidak bisa menikmati besarnya anggaran itu, lantaran tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Jika hanya mengandalkan APBD Berau sebesar Rp 5,5 triliun untuk seluruh Berau tentunya tidak akan cukup. Belum lagi tidak semua APBD muaranya untuk pembangunan. Dana aspirasi anggota DPR RI yang cukup besar itu seharusnya juga bisa menyentuhkan kemajuan Berau.

“Harusnya dengan jumlah pemilih yang besar, suara dari Berau juga harus lebih besar. Tapi dengan catatan harus kompak. Yang tidak disadari orang Berau, mereka memilih orang luar untuk mewakili mereka. Pertanyaannya manfaat apa yang didapat orang Berau dengan memilih orang luar itu?,” tanyanya.

Momentum pemilihan legislatif (Pileg) tahun depan menjadi kesempatan baginya untuk mengubah hal itu.

Selain soal anggaran, kewenangan juga menjadi perhatiannya. Sejak 8 tahun terakhir, satu per satu kewenangan daerah dialihkan ke pusat. Seperti halnya, kelautan, pertambangan hingga kehutanan. Itu menjadi ma-

salah di Berau karena sepertiga wilayah Berau terdiri dari laut, sepertiga lagi hutan, tapi daerah justru tidak boleh mengurusnya. Kewenangan yang diambil pusat inilah yang akan diperjuangkan pria kelahiran 26 Agustus 1968 yang hendak duduk dikursi legislatif pusat itu.

“Bagaimana kita bisa mengurus kampung kalau tidak punya kewenangan? Karena kewenangan berada di pusat, caranya kita jadi orang pusat saja biar bisa mengurus kampung. Satu-satunya peluang ya orang Berau menunjuk

orangnya sendiri jadi orang pusat. Dengan cara menjadi anggota DRI RI. Supaya kompak, masyarakat juga harus paham apa manfaat jadi anggota legislatif,” terangnya.

Terlepas dari semua itu, Agus yakin dan optimistis untuk maju ke DPR RI demi membangun Kabupaten Berau. Dia berharap dengan niat baiknya melangkah ke pusat, mas-

asyarakat memberikan kepercayaan dirinya sebagai putra daerah Berau yang mampu membangun Berau.

“Masyarakat juga perlu paham manfaatnya kita punya orang di DPR RI supaya pembangunan di Berau lebih cepat. Apa yang saya sampaikan sederhana dan gampang dimengerti orang. Alhamdulillah sebagian yang sudah mendengar saya juga ikut bergerak,” tutupnya. (mnz/dez)

**Pewarta: Amnil Izza**  
**Editor: Dezwan**



**Bagaimana kita bisa mengurus kampung kalau tidak punya kewenangan? Karena kewenangan berada di pusat, caranya kita jadi orang pusat saja biar bisa mengurus kampung. Satu-satunya peluang ya orang Berau menunjuk orangnya sendiri jadi orang pusat. Dengan cara menjadi anggota DRI RI. Supaya kompak, masyarakat juga harus paham apa manfaat jadi anggota legislatif,”**

**Agus Tantommo, Anggota DPR RI dapil Kalimantan Timur**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

## DPRD BERAU INGATKAN BUPATI PILIH SEKDA YANG NETRAL

**TANJUNG REDEB** - Seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) Berau saat ini masih berlangsung. Sementara, posisi Sekda Berau diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yaitu, Sujadi, yang juga Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setkab Berau, sejak 1 September 2023 lalu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani mengingatkan kepada Bupati Berau agar memilih Sekda Berau baru yang tepat, netral dan tidak tergiring ke dunia politik. Diketahui tercatat sudah ada 8 nama peserta calon Sekda Berau.

Dikatakannya, Bupati Berau selaku Kepala Daerah haruslah melihat profil peserta calon Sekda Berau atas dasar kinerjanya selama ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Serta, yang mampu menjadi cadangan, bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat, dan bisa memberikan solusi.

"Profil semua peserta harus dilihat secara detail dan harus mampu membackup serta bertanggung jawab dan memberi-

kan solusi," ucapnya.

"Kemudian, jangan berpikir setelah menduduki jabatan ada keinginan untuk terjun ke dunia politik. Selesaikan dulu jabatannya, baru berpikir untuk ke dunia politik," ujarnya, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya, jabatan sebagai Sekda Berau merupakan amanah yang besar dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan.

Selain itu, Sekda Berau juga merupakan ujung tombak kepala daerah baik dalam mengontrol pegawainya ataupun program-program kerja Bupati. Sehingga, diharapkan program-program itu nantinya bisa tercapai minimal 90 persen.

"Alhamdulillah kalau bisa capai 100 persen, tapi minimal 90 persen bisa terealisasi," katanya.

Lanjutnya, peran Sekda juga dinilai sangat penting untuk memberikan solusi apabila kepala daerah dalam masalah. Bahkan diharapkan dapat menjaga dan menyelamatkan kepala daerah.

"Kalau Sekda tidak jeli, tidak kompeten dan tidak berpengalaman dalam mengatasi ma-

salah, tentu akan jadi masalah. Menurut saya semua peserta cocok, tinggal nanti bagaimana Bupati sebagai kepala daerah yang menentukan," tegasnya.

Madri juga mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam memilih Sekda. Jangan juga dilihat dari keluarganya di politik. Serta harus netral dan tidak tergiring ke dunia politik.

"Jika perlu, cari Sekda yang netral dan tidak tergiring ke dunia politik. Karena tanggung jawab menjadi Sekda itu besar," paparnya.

Untuk itu, diharapkannya bupati jangan salah pilih demi menjaga birokrasi pemerintahan di Kabupaten Berau. Apalagi kebijakan Sekda sangat vital. Bahwa keberhasilan suatu kepala daerah bikan tentang siapa dirinya. Tapi bagaimana bawahannya bisa diajak rapat koordinasi.

"Karena kalau salah pilih maka birokrasi pemerintah menjadi tidak bagus. Jadi ya perlu hati-hati," tutupnya.

**Pewarta: Amnil Izza**  
**Editor: Nicha Ratnasari**





# POLDA KALTIM MUSNAHKAN GANJA DARI KELOMPOK KEMPING



SATPOL PP TERTIBKAN  
POM MINI YANG MENJAMUR  
DI BALIKPAPAN



Kanit Sidik Subdit II Ditreskoba Polda Kaltim, Iptu Arif Rahman dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim AKBP I Nyoman Wijana memimpin pemusnahan barang bukti ganja.

## POLDA KALTIM MUSNAHKAN GANJA DARI KELOMPOK KEMPING

**BALIKPAPAN** - Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Kaltim bersama Kejaksaan Negeri (PN) Balikpapan serta para tersangka dan kuasa hukumnya melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba jenis ganja di Makopolda Kaltim pada Rabu (13/9/2023).

Pemusnahan ini dipimpin oleh Kanit Sidik Subdit II Ditreskoba Polda Kaltim, Iptu Arif Rahman dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim AKBP I Nyoman Wijana dengan menumpahkan barang bukti ganja ke dalam blender yang sudah berisi cairan dicampur bahan prostex dan kemudian dibuang ke dalam toilet.

Kanit Sidik Subdit II Ditreskoba

Polda Kaltim, Iptu Arif Rahman mengatakan, kasus ini diungkap pada awal September 2023 lalu. Di mana para tersangka ini merupakan kelompok anak kemping masing-masing berinisial ZF (40), MS (26), AD (28) dan FI (39).

"Mereka kita tangkap di rumah ZF, usai mengambil barang yang dipesan melalui jasa ekspedisi," ujarnya.

Lebih lanjut Arif Rahman menjelaskan, barang bukti ganjan kering yang didapat dari tangan para tersangka sebanyak 303,73 gram dan sudah terbagi kedalam beberapa paket, termasuk lintingan berupa rokok.

"Ada 6 paket besar serta beberapa paket kecil termasuk mereka sudah ada yang membuat lintingan seperti rokok," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, para tersangka ini sudah 6 bulan menggunakan ganja. Bahkan untuk ZF sudah dua kali memesan ganja dari Kota Medan.

"Si ZF ini sudah dua kali pesan. Kalau yang bertiga ini sifaynya sumbangan dan pas datang dibagi sesuai uangnya mereka. Cuma lokasi pesannya sama dengan ZF juga dari Medan," tambah Arif Rahman.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) sub pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman kurungan penjaranya sampai 12 tahun.

**Penulis: Aprianto**

**Editor: Nicha Ratnasari**





Kecelakaan lalu lintas di Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di KM 60 Samboja.

## KECELAKAAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA, MUATAN IKAN BERSERAKAN, KERUGIAN CAPAI BELASAN JUTA

**BALIKPAPAN** - Kecelakaan yang melibatkan kendaraan pick up terjadi di Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) di kilometer 60 arah Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu (13/9) sekitar pukul 07.40 WITA.

Kendaraan yang membawa muatan ikan tersebut mengalami pecah ban, menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai belasan juta rupiah.

Kombes Pol. Sonny Irawan, Dirlantas Polda Kaltim, melalui Kasat PJR Ditlantas Polda Kaltim, Kopol La Ode, mengatakan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh ban pick up yang pecah. Kendaraan tersebut membawa sejumlah kotak berisi ikan.

"Kendaraan pick up yang membawa ikan mengalami pecah ban, sehingga

sopirnya kaget dan harus banting setir," ujarnya saat dikonfirmasi.

Kopol La Ode menambahkan, saat kejadian, kendaraan bergerak dengan kecepatan sekitar 70-80 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, kendaraan menjadi sulit dikendalikan.

"Sopirnya kaget dan kemudian banting setir ke kanan, sehingga kotak-kotak berisi ikan yang dikemas dengan styrofoam terhambur ke jalanan," jelasnya.

Dari insiden ini, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materiil diperkirakan mencapai antara Rp 10-15 juta.

"Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materiil sekitar Rp 10-15 juta," pungkasnya.

**Penulis: Aprianto**

**Editor: Agus Susanto**



Petugas Satpol PP Kota Balikpapan saat menyita salah satu Pom Mini di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Balikpapan Tengah.

## SATPOL PP TERTIBKAN POM MINI YANG MENJAMUR DI BALIKPAPAN

**BALIKPAPAN** - Tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perdagangan, BPBD, Kecamatan, Kelurahan hingga TNI-Polri menggelar razia dan penertiban terhadap sejumlah Pom Mini yang berada di kawasan Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah pada Rabu (13/9/2023).

Sekretaris Satpol PP Kota Balikpapan, Izmir Novian Hakim mengatakan, kegiatan ini merespon semakin menjamurnya Pom Mini di Kota Balikpapan. Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, di tahun 2019 lalu ada sebanyak kurang lebih 100 Pom Mini. Namun saat ini sudah ada sekitar 600-an lebih Pom Mini di Kota Balikpapan.

"Sebenarnya ini kegiatan rutin saja. Kami melakukan penertiban Pom Mini yang sudah ada dalam Perda kita Nomor 1 Tahun 2001 bahwa di pasal 19 itu dilarang menjual BBM eceran dan atau SPBU mini seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut Ismir menjelaskan, jika keberadaan Pom Mini yang semakin menjamur ini tidak ditertibkan, maka risiko bahaya kebakaran bisa mengancam warga sekitarnya.

"Kalau tidak kita tertibkan berbahaya, berpotensi kebakaran sebenarnya. Kemudian dari sisi regulasi juga tidak ada kan. Makanya kami pemerintah kota bersama instansi ter-

kait melakukan giat penertiban yang akan berkesinambungan," jelasnya.

Dari penertiban yang dilakukan tim gabungan ini terdapat 10 Pom Mini yang disita petugas. Hal ini karena pemilik Pom Mini tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan Satpol PP.

"Ada 10 yang kita sita, itu di Balikpapan Tengah ada 6 dan Balikpapan Kota ada 4," tambah Ismir.

Ismir mengaku sebelum memberi tindakan tegas, Satpol PP lebih dulu memberi surat teguran kepada pemilik Pom Mini ini.

"Sebelumnya sudah kita jaring, kita berikan teguran untuk memindahkan dan sampai pada hari ini, batas waktu yang ditentukan mereka belum memindahkan dispenser Pom Mini itu sehingga kita lakukan penyitaan," tegasnya.

Nantinya para pemilik Pom Mini ini akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. "Nanti kita sidang dulu di Pengadilan. Biar Pak Hakim yang memutuskan apakah BB (Barang Bukti) ini akan dikembalikan atau dimusnahkan, nanti biar kita lanjutkan di persidangan," tutupnya.

**Penulis: Aprianto**

**Editor: Nicha Ratnasari**





Pariipurna DPRD Balikpapan Terkait Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas 5 Rancangan Peraturan Daerah.

## GELAR PARIPURNA, DPRD DAN PEMKOT BAHAS 5 RAPERDA

**BALIKPAPAN** - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang III Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Rabu (13/9/2023).

Adapun agendanya yakni penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD tahun anggaran 2024.

Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD -P) Tahun Anggaran 2023. Ketiga, pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi.

Keempat, sistem kesehatan daerah. Dan ke lima, perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh mengatakan, dalam

rapat paripurna ini ada sejumlah agenda yang dilaksanakan. Di antaranya nota penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD 2024 dan nota penjelasan Wali Kota atas APBD Perubahan 2023.

"Jadi dalam beberapa pekan ke depan, DPRD bersama Pemkot Balikpapan akan maraton membahas dua Raperda APBD ini," ujarnya.

Lanjut Abdulloh, setelah pandangan umum kemudian agendanya adalah jawaban Wali Kota terkait pandangan umum fraksi-fraksi dan kemudian disambung dengan pandangan akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan bersama.

"Kami akan lanjutkan, mudah-mudahan tanggal 20 sudah ada pendapat akhir fraksi yang dilanjutkan dengan pendatanganan bersama kesepakatan dari RAPBD menjadi APBD-P 2023 medatang," jelasnya.

Abdulloh menyebutkan untuk

APBD murni tahun 2023 tidak boleh ada Silpa anggaran, sehingga harus zero.

"Jadi semaksimal mungkin harus zero. Karena APBD Perubahan 2023 melanjutkan APBD Murni 2023," tambahnya.

Legislatif dan eksekutif telah resmi menyepakati kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas platform anggaran sementara (KUPA PPAS) Perubahan 2023.

"Kami sepakat rencana APBD setelah perubahan sebesar Rp 4,1 triliun. Nominal ini meningkat tapi ini masih prognosis yang menggunakan dasar aturan juga," ujar Abdulloh lagi.

Termasuk mempertimbangkan acuan lalu, seperti dana bagi hasil (DBH) pusat, DBH provinsi, dan pendapatan lainnya yang belum masuk dalam perhitungan. (adv)

**Pewarta : Aprianto**  
**Editor : Nicha Ratnasari**

## PASER BELAJAR KELOLA TATA KOTA DARI KABUPATEN BANDUNG



ER,



**ISU KADES "TAK BERIDENTITAS" DIPAKSA  
DUKUNG ISTRI BUPATI PASER MAJU CALEG  
DPD RI, APDESI : JANGAN TERPROVOKASI !**





Bupati Paser, Fahmi Fadli

## PASER BELAJAR KELOLA TATA KOTA DARI KABUPATEN BANDUNG

**PASER** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tengah mempersiapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi dampak yang bakal diterima Kabupaten Paser dengan hadirnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adanya IKN Nusantara nantinya, bakal merambah pada bertambahnya jumlah penduduk hingga pesatnya pembangunan. Sebagai satu di antara beberapa wilayah yang berdekatan den-

gan IKN Nusantara, Pemkab Paser menilai perlu menata wilayah sebelum terlanjur banyaknya bangunan.

Salah satu langkah yang dilakukan, yaitu dengan mencoba mengulik informasi dari Kabupaten Bandung, yang dinilai mampu menata wilayah secara teratur melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) hingga dikategorikan sebagai penataan kota terbaik nomor satu di Indonesia.

"Ini kesempatan kita untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, bagaimana nantinya bisa diterapkan sesuai dengan kondisi di daerah," terang Bupati Paser, Fahmi Fadli saat berkunjung ke Kabupaten Bandung, Rabu (13/9/2023).

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser, Adi Maulana menjelaskan, selain upaya dini pengentasan kawasan kumuh, penataan perlu dilakukan sebab Kabupaten Paser baru saja meraih Adipura.

"Makanya kita menata kawasan-kawasan harus sejak dini punya strategi dan pola khusus

dalam menangani kawasan kumuh," jelas Adi.

Jika Kabupaten Paser sudah tertata nantinya, maka dapat menarik perhatian pengunjung setelah banyaknya penduduk yang berpindah ke IKN Nusantara. Hal ini tentu pula menjadi target Pemkab Paser.

"Ribuan penduduk bakal berdatangan ke IKN, dikhawatirkan nanti yang datang melebihi kapasitas jadi perlu menyiapkan kawasan-kawasan kita," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana mengatakan, inovasi yang diterapkan dalam pengentasan kawasan kumuh hingga penataan kota. Pemerintah memaksimalkan pengelolaan penataan daerah melibatkan intansi terkait.

"Banyak inovasi yang dilakukan Pemkab Bandung dalam penerapannya, namun disini lain kami juga belajar dengan kabupaten lain, dalam pertemuan ini kami sudah menghadirkan beberapa OPD untuk diskusi bersama nantinya," tutupnya.

**Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari**

# ISU KADES "TAK BERIDENTITAS" DIPAKSA DUKUNG ISTRI BUPATI PASER MAJU CALEG DPD RI, APDESI : JANGAN TERPROVOKASI !

**PASER** – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Paser yang enggan menyebutkan identitasnya membuat pengakuan di beberapa media online bahwa dipaksa untuk memenangkan Sinta Rosma Yenti sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Para Kades tersebut bahkan mengaku diminta untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga dan memenangkan di masing-masing desa dengan minimal perolehan 80 persen. Jika target tidak terpenuhi, maka pemotongan Dana Desa (DD) jadi ancamannya.

Kondisi ini membuat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser bersuara. Ketua Apdesi Kabupaten Paser, Nasri secara tegas mengingatkan agar para kades lainnya tidak terprovokasi dengan pengakuan-pengakuan yang menyatakan diri sebagai kades tapi tidak berani membuktikan identitasnya secara terbuka.

"Saya tidak ada niatan untuk membela. Namun yang perlu saya tegaskan, silakan kades yang memberikan pengakuan itu muncul. Jangan melempar isu tapi tidak menjelaskan siapa dirinya. Ini berpotensi membuat gaduh sesama Kades," kata Nasri, Rabu (13/9/2023).

Menurut Nasri, dugaan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyeret nama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Paser itu, merupakan ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Namun begitu, lanjut Kades Long Pinang ini, agar Kades 139 Desa tidak terpancing untuk membuat pernyataan yang ber-



Ketua APDESI Kabupaten Paser, Nasri

dampak pada peluang lawan politik yang berimbas pada pertikaian antar Kades.

Ia mengingatkan agar para kades tidak terpicu untuk saling tuduh. Pihaknya berharap, agar persoalan ini juga segera diselesaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), agar isu yang terjadi tidak berkembang bahkan bias di luar konteks.

"Ini perlu juga diselesaikan. Kami tidak ingin atas nama kades diseret-seret dalam masalah ini. Apalagi yang memberikan pengakuan tidak ingin menyebutkan identitasnya. Ini berpotensi jadi saling tuduh. Jadi saya imbau agar semua pihak tidak terpicu oleh persoalan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten Paser, Sinta Rosma Yenti dalam klarifikasinya, membantah tuduhan yang melibatkan Kepala Desa (Kades), Kelompok ibu-ibu Dasawisma dan Rukun

Tetangga (RT) untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga.

Sinta beralasan hal tersebut sebagai bagian dari kampanye hitam atau black campaign yang merugikan dirinya untuk maju sebagai calon anggota legislatif DPD RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim. Ia dituding memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua TP-PKK dan istri Bupati untuk meraup dukungan.

"Bahwa informasi yang berkembang merupakan salah satu bentuk kebencian terhadap saya yang berujung pada black campaign" ucapkan dalam tulisan resmi.

Diketahui, istri Bupati Paser, Fahmi Fadli itu tengah jadi sorotan landaran dugaan penyalahgunaan wewenang. Sinta Rosma Yenti maju sebagai Caleg DPD RI nomor urut 17 bersaing dengan 20 caleg lainnya dari Provinsi Kaltim.

**Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari**



# PEMERHATI POLITIK DAN HUKUM ANGKAT BICARA SOAL DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG SINTA ROSMA YENTI

**PASER** - Pemerhati Politik dan Hukum (Patih), Muchtar Amar, turut angkat bicara mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sinta Rosma Yenti.

Menurutnya, dugaan yang ramai jadi perbincangan di media sosial itu, cukup disayangkan jika benar terjadi. Pasalnya, Sinta Rosma Yenti merupakan istri Bupati Paser, Fahmi Fadli. Sehingga dianggap tidak elok karena memanfaatkan kedudukan yang ada.

"Tentu sangat disesalkan jika benar demikian. Harusnya, walaupun yang bersangkutan istri pejabat, tidak bisa serta merta menggunakan kekuasaan itu. Apalagi menggunakan ancaman terhadap anggaran," kata pria yang juga seorang praktisi hukum itu, Rabu (13/9/2023).

Hingga kini diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menelusuri kebenaran informasi tersebut. Muchtar mengingatkan, agar Bawaslu serius dan tegas terhadap adanya informasi itu.

"Bawaslu harus tegas ya. Tentu saja laporan itu nantinya dapat dikembangkan kembali melalui temuan-temuan yang ditemukan dalam penelusuran maupun pemeriksaan menurut norma Perbawaslu", ucapnya.

Diketahui, Sinta Rosma Yenti, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP-PKK) Kabupaten Paser, tengah jadi sorotan karena diduga memanfaatkan kedudukannya untuk mendapat dukungan lewat pengumpulan fotokopi KTP warga.

Hal itu ramai, setelah beredar



Patih, Muchtar Amar

isi pesan dari tangkapan gambar yang beredar di media sosial. Dalam isi pesan tersebut, Kepala Desa (Kades) juga turut dijanjikan reward atau penghargaan atau imbas jasa yang telah mendukungnya untuk duduk di DPD RI.

Sinta Rosma Yenti terdaftar sebagai Bacaleg DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalim dengan nomor urut 17. Sebelumnya, Sinta sudah menanggapi isu yang beredar secara tulisan kepada media dan klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Kaltim.

Sinta berkeyakinan mas-

arakat Paser akan bangga ketika ada perwakilan dari daerah asalnya yang duduk di parlemen nasional. Apalagi saat ini Kabupaten Paser menjadi bagian daerah penyangga IKN.

"Perlu saya sampaikan, bahwa informasi yang beredar di media sosial dan media online tidaklah benar dan tidak mendasar, bahwa informasi yang berkembang merupakan salah satu bentuk kebencian terhadap saya yang berujung pada black campaign," katanya.

**Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari**